

**PENERAPAN PIDANA DENDA BAGI PELAKU TINDAK  
PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK**

**I KETUT SUDARTA**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui akibat yang diderita anak korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa. Terjadinya perbuatan pelecehan seksual selalu mengundang unsur kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh pelaku pelecehan seksual. Implementasi dari suatu pelecehan seksual tidak saja dirasakan oleh korban tetapi juga keluarga korban. Korban kejahatan pelecehan seksual menderita kerugian akumulatif yang tidak semata-mata secara fisik namun psikis. Di samping itu penelitian ini untuk mengetahui penerapan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual. Teori yang digunakan berkaitan dengan penyebab dan akibat dari suatu kejahatan adalah teori kesempatan, yang mengatakan bahwa bila keadaan dalam masyarakat memberi kesempatan, maka dalam masyarakat akan timbul kejahatan. Selain itu teori lainnya adalah teori anomie yang melihat masyarakat sudah tidak mentaati aturan-aturan yang mengaturnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative, yakni penelitian yang bersumber dari data dokumentasi atau pustaka, sehingga bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum ini dianalisis secara deskriptif, interpretative, evaluative, argumentative dan sistematis. Kesimpulan yang dibuatkan penulis adalah bahwa akibat yang diderita oleh anak yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual seperti tampak pada tanda-tanda perilaku, tanda-tanda kognisi, tanda-tanda sosial-emosional, dan tanda-tanda fisik. Perlindungan yang diberikan kepada anak berupa rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual tidak saja penjatuhan pidana penjara tetapi pidana denda. Namun implementasinya pidana denda atas tindak pidana pelecehan seksual belum efektif dilaksanakan. Pengaturan pidana denda pada Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak, tidak memberikan keuntungan terhadap anak korban pelecehan seksual karena denda diperuntukkan bagi negara. Saran yang diajukan penulis, hendaknya pidana denda diterapkan dan diperuntukkan bagi korban pelecehan seksual bukan bagi negara karena Negara tidak dirugikan. Negara harus menjadi pelindung dan pengayom warga negaranya.

**APPLICATION FOR CRIMINAL FINE BUSINESS CRIMINAL  
SEXUAL ABUSE OF CHILDREN UNDER LAW  
NUMBER 23 OF 2002 CONCERNING THE  
PROTECTION OF CHILDREN**

**I KETUT SUDARTA**

**ABSTRACT**

This study was conducted to determine the effects suffered by children victims of sexual abuse committed by adults. The occurrence of acts of sexual harassment is always inviting elements of violence or threats of violence by the perpetrator. Implementation of a sexual harassment is not only felt by the victims but also the families of the victims. Victims of crimes of sexual abuse suffered accumulative losses that are not merely physically but psychologically. In addition, this study to determine the application of criminal penalties against the perpetrators of the crime of sexual abuse. The theory used in connection with the causes and consequences of a crime is an opportunity theory, which says that if the situation in the community provide opportunities, then the society will arise crime. Besides other theory is the theory of anomie that the viewing public has not obey the rules that govern it. The method used is a normative legal research, namely research data sourced from documentation or library, so the legal materials used are primary legal materials, secondary law, and tertiary legal materials. The legal materials were analyzed by descriptive, interpretative, evaluative, argumentative and systematic. The conclusion is that the author created as a result suffered by children who are victims of criminal acts of sexual abuse as seen in the signs of behavior, cognition signs, signs of social-emotional, and physical signs. The protection given to children in the form of rehabilitation as referred to in Article 39 of Law No. 23 of 2002 on Child Protection. For criminal sexual abuse not only imprisonment but the imposition of criminal penalties. However, the implementation of criminal penalties for the crime of sexual harassment has not been effectively implemented. Setting criminal penalties in Article 81 and Article 82 of the Child Protection Act, does not provide benefits to the child victims of sexual abuse because fines destined for the country. Suggestions put forward the author, the criminal penalties should be applied and intended for victims of sexual harassment is not for the state because the state is not harmed. The state should be the patron and protector of its citizens.